

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah yang paling kritis dalam pembangunan nasional adalah kemiskinan. Masalah ini tentu perlu diselesaikan, terutama di negara sedang berkembang. Indonesia masih menghadapi tantangan kemiskinan, termasuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ironisnya, Provinsi Sumatera utara dikenal sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan banyaknya potensi sumber daya alam dan hasil bumi seperti minyak bumi, gas alam, hasil hutan dan juga hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet yang dijadikan sebagai bahan baku industri dan menjadi pendorong perekonomian Sumatera Utara (Misfaruddin *et al.*, 2024).

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Kemiskinan menjadi hambatan dalam mewujudkan salah satu tujuan pembangunan nasional dalam menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat baik secara material maupun spiritual. Dari kemiskinan, dapat timbul permasalahan sosial lainnya seperti pemukiman kumuh, anak jalanan yang kebanyakan putus sekolah, peningkatan angka kriminalitas dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi salah satu sasaran pembangunan yang harus di evaluasi secara rutin (Darmawanto, 2023).

Kemiskinan sudah menjadi fenomena yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena dengan terjadinya masalah kemiskinan membuat masyarakat semakin sulit berkembang dan mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Tingginya

angka kemiskinan di suatu daerah bisa disebabkan karena faktor seperti kondisi ekonomi, masyarakat atau penduduk yang tidak memiliki sumber daya yang cukup dan kualitasnya rendah. Karena sumber daya yang rendah, maka produktivitas juga rendah, sehingga upah yang diterima pun rendah. Maka dari itu kemiskinan di suatu daerah adalah tanggung jawab pemerintah, dimana pemerintah harus ikut campur tangan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan kerja, masyarakat dapat memperoleh penghasilan, meningkatkan perekonomian dan bisa memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik dari sebelumnya (Rahmah *et al.*, 2023)

Di berbagai daerah, kemiskinan menjadi masalah umum yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Seseorang dianggap miskin jika tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang kuat dengan cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola dan menyalurkan pendapatan asli daerah dan bantuan yang diterima dari pusat kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran dana yang terencana dengan baik menjadi kunci yang sangat penting dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di suatu daerah (Amami & Asmara, 2022).

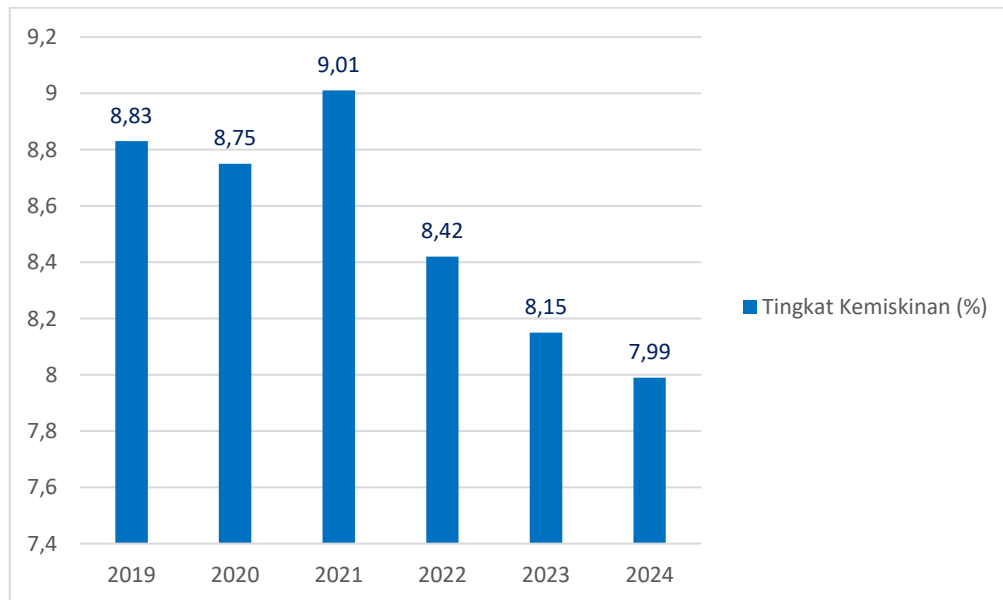
Menurut Badan Pusat Statistik (2010), karakteristik masyarakat miskin adalah mereka yang berpenghasilan dibawah Rp.7.057 per orang setiap harinya. Perhitungan garis kemiskinan ini berasal dari perhitungan yang mencakup kebutuhan pangan dan non pangan, dengan kebutuhan pangan minuman standar 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sementara kebutuhan non pangan mencakup kebutuhan dasar seperti perumahan, seperti perumahan (luas bangunan, akses air

bersih dan fasilitas pembuangan air besar), Pendidikan (tingkat literasi, wajib belajar sembilan tahun dan angka putus sekolah), dan Kesehatan (konsumsi makanan bergizi yang rendah, sarana kesehatan yang terbatas, serta kondisi sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai (Kassahun *et al.*, 2022).

Sumatera Utara sebagai salah satu dari 38 provinsi di Indonesia tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan terus berupaya mengatasi persoalan kemiskinan secara regional yang diharapkan berdampak pada pengentasan kemiskinan secara nasional. Kemiskinan yang terjadi di suatu daerah selalu menjadi perhatian besar, mereka yang hidup dalam kemiskinan sering kali tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, yang mengakibatkan masalah gizi dan akses pendidikan yang terbatas sehingga akan sulit untuk bersaing dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan pengangguran. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan adalah suatu keharusan. Meskipun kemiskinan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikurangi melalui program pembangunan yang berkelanjutan (Nainggolan, 2020).

Di Indonesia, kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan besar pembangunan, dan kondisi serupa juga terlihat di Provinsi Sumatera Utara. Data BPS Sumatera Utara (2024) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Walaupun angka kemiskinan tidak relatif besar, tetapi Sumatera Utara masih tetap mengalami permasalahan kemiskinan dan akan terus berupaya mengatasi persoalan tersebut agar masyarakat yang ada di Sumatera Utara bisa hidup sejahtera.

Adapun data Tingkat Kemiskinan di Sumatera utara periode 2019-2024 seperti terlihat pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara 2019-2024 (Persen)

Sumber: *BPS Sumatera Utara 2026*

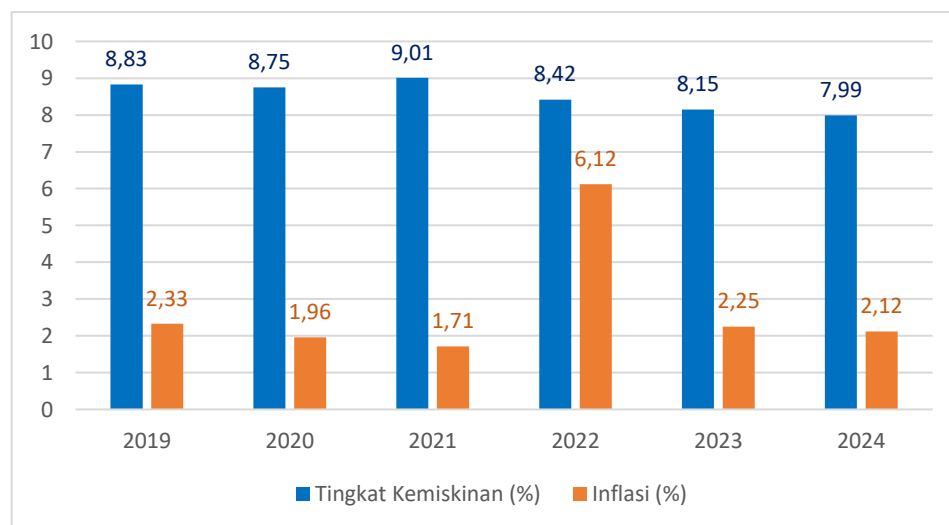
Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara khususnya pada sepanjang tahun 2019 – 2024 namun cenderung mengalami penurunan berawal dari tahun 2019 dengan angka 8,83 persen sampai tahun 2020 dalam angka 8,75 persen yang disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang masih stabil, dukungan bantuan sosial pemerintah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun penurunannya terbatas karena mulai muncul tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 (Akbar *et al.*, 2022). Kemudian Tingkat kemiskinan sempat naik di tahun 2021 sebesar 9,01 persen karena efek dari pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengurangi gaji karyawan.

Penurunan pendapatan ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah. Selain itu, terjadi kenaikan harga bahan pangan juga memperburuk angka kemiskinan. Saat harga bahan makanan meningkat, orang dengan pendapatan terbatas akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka (Matondang *et al.*, 2024). Pada tahun 2022 sampai 2024 tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang terjadi karena adanya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, meningkatnya aktivitas usaha dan kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial dari masyarakat, yang dimana kondisi ini memberikan dampak positif yang cukup berarti bagi pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Penurunan kemiskinan juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian, dan upaya selalu dilakukan untuk menjaga laju pertumbuhannya tetap rendah dan stabil agar tidak menimbulkan masalah makroekonomi yang dapat mengarah pada ketidakstabilan ekonomi. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Ketika sebuah negara mengalami kondisi lesu, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dengan cara menurunkan suku bunga. Inflasi yang tinggi mencerminkan adanya ketidakstabilan dalam ekonomi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum berkelanjutan, serta meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Seiring dengan tingginya inflasi, masyarakat yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya kini kesulitan karena melonjaknya harga barang dan jasa yang berdampak pada peningkatan kemiskinan (Siregar *et al.*, 2023).

Kenaikan biaya hidup setiap tahun di Sumatera Utara memberikan kontribusi terhadap peningkatan inflasi. Inflasi itu situasi dimana harga barang dan jasa secara umum terus meningkat dalam periode tertentu. Oleh karena itu, tingkat inflasi di Sumatera Utara bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai keadaan perekonomian daerah tersebut. Pemerintah perlu mengambil langkah atau kebijakan yang tepat untuk mengendalikan inflasi, karena inflasi yang tinggi berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, maka tingkat kemiskinan masyarakat cenderung ikut naik.

Adapun data Inflasi dan Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara periode 2019-2024 seperti terlihat pada gambar 1.2 berikut:



Gambar 1. 2 Inflasi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara 2019-2024 (Persen)

Sumber: *Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2026*

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa inflasi di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, inflasi tercatat sebesar 2,33 persen akibat lonjakan harga cabai merah sehingga memicu lonjakan angka inflasi pada

juni mencapai 1,63 persen (Suheriadi, 2019). Pada tahun 2020 inflasi turun sebesar 1,96 persen akibat dampak pandemi Covid-19. Lalu tahun 2021, inflasi turun lagi menjadi 1,71 persen disebabkan berlanjutnya dampak Covid-19 yang menekan daya beli masyarakat. Pada tahun 2022, inflasi naik sangat tajam sampai 6,12 persen. Kenaikan ini terutama didorong oleh lonjakan harga pada kelompok pengeluaran transportasi dan bahan pangan akibat kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi serta gangguan pasokan global. Kemudian kembali turun pada tahun 2023 sampai 2024 dari 2,25 persen menjadi 2,12 persen.

Fenomena yang terjadi ada pada tahun 2021, yang dimana data menunjukkan bahwa inflasi di Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 1,71 persen, sedangkan tingkat kemiskinan justru naik sebesar 9,01 persen. Secara teori, penurunan inflasi seharusnya meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Akan tetapi, pada tahun 2021 justru berlawanan dengan teori yang mengatakan jika inflasi menurun kemiskinan juga menurun. Maka dari itu perlu untuk dikaji lebih lanjut.

Fenomena selanjutnya terjadi pada tahun 2022, yang dimana data menunjukkan bahwa inflasi di Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 6,12 persen, sedangkan tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 8,42 persen. Kenaikan inflasi ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19, dimana permintaan akan barang dan jasa dari masyarakat meningkat, terutama dalam sektor makanan dan energi. Kondisi ini menunjukkan inflasi bersifat sehat, karena menggambarkan adanya peningkatan dalam aktivitas ekonomi serta kemampuan daya beli masyarakat (Bank Indonesia, 2022). Di sisi lain, penurunan

kemiskinan mencerminkan bahwa masyarakat telah mulai menikmati hasil dari pemulihan ekonomi. Sektor seperti perdagangan dan pertanian kembali berkembang, sehingga membuka peluang kerja baru serta meningkatkan pendapatan.

Selain inflasi, tingkat pendidikan juga berperan dalam mempengaruhi kemiskinan. Dalam jangka panjang, pendidikan sangat penting untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia dan negara lain. Ini terjadi baik secara langsung melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun melalui pemberian keterampilan yang diperlukan kepada kelompok miskin agar mereka dapat meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah yang berguna untuk mengembangkan inovasi dan keahlian baru yang dapat menghasilkan pendapatan, sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan sehingga pembangunan daerah tersebut juga akan mudah untuk dicapai. Oleh karena itu, pendidikan dapat dianggap sebagai investasi untuk pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan di masa depan (Susanto & Pangesti, 2019).

Pendidikan dalam penelitian ini dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator dasar dalam bidang pendidikan yang digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk usia sekolah yang aktif menempuh pendidikan pada jenjang tertentu. APS menunjukkan persentase penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah

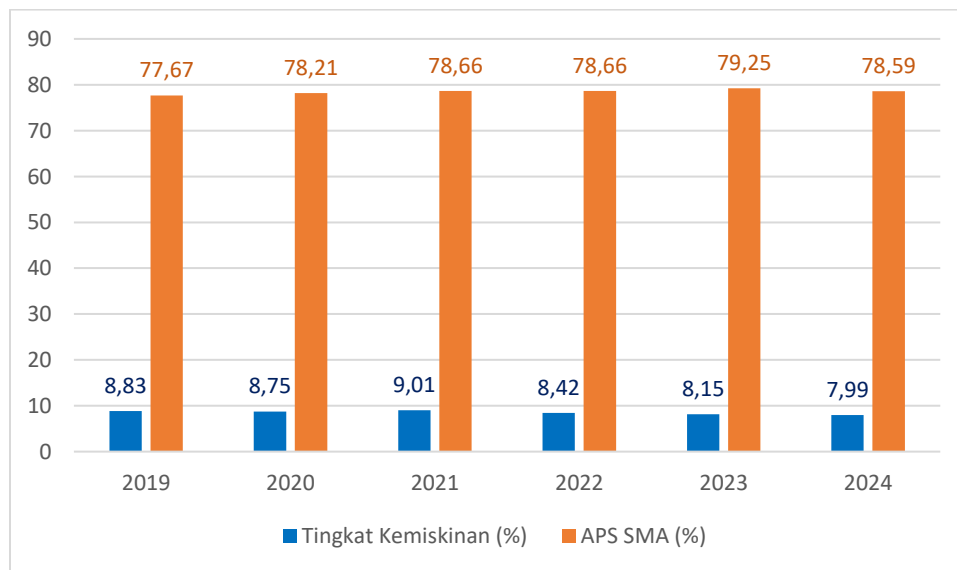
dibandingkan dengan total penduduk pada kelompok usia yang sama (*Togatorop et al.*, 2024). Semakin tinggi nilai APS, maka semakin besar tingkat keterlibatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan formal.

Dalam penelitian ini, APS yang digunakan adalah APS kelompok usia 16-18 tahun, yaitu kelompok usia yang mempresentasikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat). Pemilihan APS pada tingkat SMA dilakukan karena jenjang pendidikan menengah memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan kerja, dan kesiapan masyarakat untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, kelompok usia 16-18 tahun juga berkaitan langsung dengan usia produktif awal, sehingga tingkat partisipasi sekolah pada jenjang ini dapat mencerminkan kualitas calon tenaga kerja di suatu daerah. Umumnya kemiskinan dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang dimiliki seseorang. Lulusan SMA memiliki peluang kerja yang lebih baik dibandingkan lulusan SD atau SMP karena telah memiliki kompetensi akademik maupun keterampilan dasar yang lebih tinggi. Semakin banyak penduduk usia 16–18 tahun yang tetap bersekolah, semakin besar peluang terbentuknya sumber daya manusia yang lebih produktif sehingga dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan (*Santika et al.*, 2023).

Perkembangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan yang dimiliki penduduk, maka semakin besar peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak, sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah

menetapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat (Eha, 2024).

Adapun data Angka Partisipasi Sekolah (SMA) di Sumatera Utara periode 2019-2024 seperti terlihat pada gambar 1.3 berikut:



Gambar 1. 3 Angka Partisipasi Sekolah (SMA) dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara 2019-2024 (Persen)

Sumber: *Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2026*

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat SMA di Sumatera Utara menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2019 sampai 2023, dimulai dari 77,67 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 79,25 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan usaha pemerintah untuk memperluas akses pendidikan melalui program beasiswa, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pendidikan. Kemudian APS menunjukkan penurunan pada tahun 2024 sebesar

78,59 persen yang mencerminkan adanya hambatan bagi sebagian penduduk usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan menengah ke atas (Parawanza *et al.*, 2025).

Fenomena yang terjadi ada pada tahun 2021, dimana Angka Partisipasi Sekolah (APS) meningkat sebesar 78,66 persen, tetapi tingkat kemiskinan juga meningkat sebesar 9,01 persen. Secara teori, peningkatan partisipasi sekolah seharusnya menurunkan kemiskinan karena semakin banyak penduduk memperoleh pendidikan keterampilan dan produktivitas yang tinggi. Namun, kondisi empiris di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil yang berlawanan dan perlu untuk dikaji lebih lanjut.

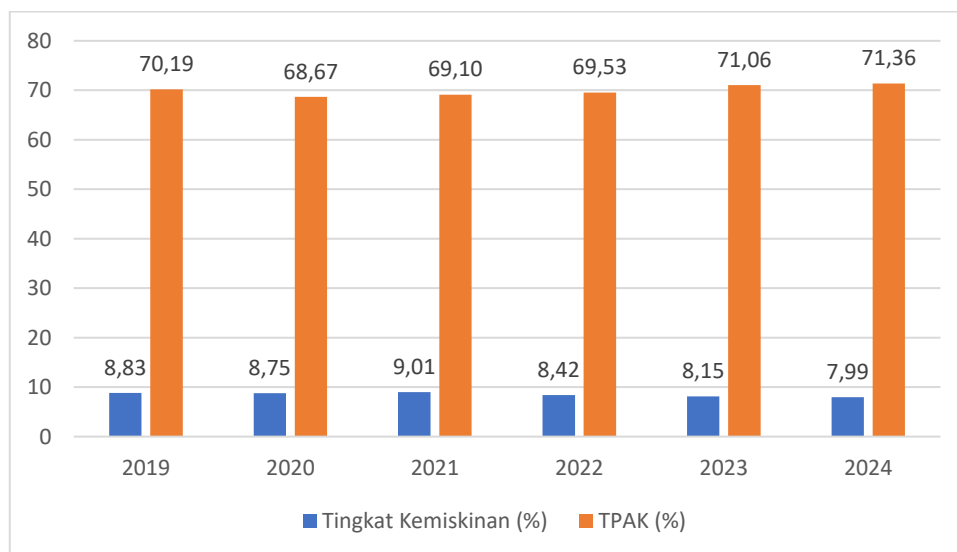
Fenomena selanjutnya terjadi pada tahun 2024, dimana angka partisipasi sekolah turun sebesar 78,59 persen, sedangkan tingkat kemiskinan juga menurun sebesar 7,99 persen. Secara teori, penurunan APS biasanya berkaitan dengan meningkatnya kemiskinan, karena pendidikan dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja. Tetapi kondisi ini tidak terlihat secara langsung dalam waktu yang singkat bahwa orang yang tidak bersekolah tidak otomatis menjadi miskin. Sementara itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2024 lebih dipengaruhi oleh membaiknya kondisi ekonomi, meningkatnya kesempatan kerja, dan berbagai program bantuan pemerintah yang membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Akibatnya, meskipun APS menurun, kemiskinan tetap bisa mengalami penurunan (Ritonga *et al.*, 2024).

Menurut Basorudin *et al.*, (2019), Kemiskinan bisa dilihat dari berbagai sisi, salah satunya dari ketenagakerjaan. Tujuan utama dari bekerja adalah untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pemerintah

terus berupaya meningkatkan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sebab ketenagakerjaan bisa menjadi sumber masalah kemiskinan jika suatu daerah memiliki banyak penduduk yang tidak bekerja, maka akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Ketenagakerjaan dianggap sebagai solusi terbaik untuk keluar dari kemiskinan karena memiliki banyak tenaga kerja yang aktif dapat meningkatkan pendapatan, yang berdampak pada pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu keluar dari kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik, persentase individu yang bekerja ataupun mencari pekerjaan di pasar tenaga kerja dikenal sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang memperlihatkan proporsi tenaga kerja yang tersedia untuk bekerja di berbagai industri. Distribusi penduduk yang aktif dengan ekonomi diprofilkan oleh pengelompokan angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin serta kelompok umur. TPAK biasanya digunakan untuk menunjukkan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif dalam ekonomi disebuah negara atau kawasan serta ketersediaan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Menurut Murialti & Reza, (2020) , tingkat partisipasi kerja atau angkatan kerja adalah perbandingan jumlah penduduk pada angkatan kerja dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia kerja.

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumatera Utara periode 2019-2024 seperti terlihat pada gambar 1.4 berikut:



Gambar 1. 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara 2019-2024 (Persen)

Sumber: *Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2026*

Berdasarkan Gambar 1.4. dapat diketahui bahwa Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sumatera utara pada tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 – 2020 tingkat partisipasi Angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 70,19 persen di tahun 2019 dan 68,67 persen di tahun 2020. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada tahun 2020, terjadinya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada berkurangnya kegiatan dalam memproduksi barang dan jasa. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) karena ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi tanggungan karyawannya sehingga berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (Syafira *et al.*, 2023). Pada tahun 2021–2024, jumlah orang yang bekerja di Sumatera Utara meningkat, dan sektor bisnis dan aktivitas ekonomi kembali berjalan, yang memungkinkan bisnis kembali menyerap tenaga kerja dan menurunkan pengangguran (Sipayung *et al.*, 2026).

Fenomena yang terjadi ada pada tahun 2020, dimana tingkat partisipasi angkatan kerja menurun sebesar 68,67 persen, tetapi tingkat kemiskinan juga menurun sebesar 8,75 persen. Secara teori, penurunan partisipasi angkatan kerja seharusnya meningkatkan kemiskinan karena lebih sedikit orang yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan mengurangi aktivitas usaha, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan mengurangi jam kerja karyawan. Di sisi lain, penurunan aktivitas ekonomi juga menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang sehingga jumlah penduduk miskin meningkat. Oleh karena itu, penurunan TPAK pada tahun 2020 diikuti oleh peningkatan kemiskinan karena dampak pandemi yang melemahkan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Sinaga *et al.*, 2022).

Fenomena selanjutnya terjadi pada tahun 2021, dimana tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat sebesar 78,66 persen, tetapi tingkat kemiskinan juga meningkat sebesar 9,01. Secara teori, peningkatan partisipasi kerja seharusnya menurunkan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, namun kondisi ini tidak terjadi karena sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor informal dengan produktivitas dan upah rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan TPAK belum efektif menekan kemiskinan, karena banyak penduduk bekerja hanya untuk bertahan hidup bukan meningkatkan pendapatan secara signifikan (Siregar *et al.*, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan variabel yang mempengaruhi kemiskinan, antara lain penelitian Nasution *et al.*, (2023), Sianturi, (2020),

menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian Malentang *et al.*, (2022), Melati *et al.*, (2021), menyimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian Sihite *et al.*, (2024), Tobing *et al.*, (2023), menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Tetapi ada penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda seperti Murobbi & Usman, (2021) dan Susanto & Pangesti, (2020) yang menyimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Lalu penelitian Nabawi, (2020) dan Aini & Islamy, (2021) menyimpulkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Dan penelitian yang dilakukan Serly *et al.*, (2025) dan Sianturi *et al.*, (2024) menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Dari beberapa penelitian, belum terdapat penelitian yang menggabungkan variabel inflasi, mengevaluasi pengaruh tingkat pendidikan dan partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya meneliti pengaruh ketiga variabel tersebut secara terpisah terhadap tingkat kemiskinan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Windari & Imaningsih, (2025) yang menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, penanaman modal dalam negeri, inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara. Penelitian Delviera & Amar, (2024) yang menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum dan investasi terhadap kemiskinan di Indonesia. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aliyah *et al.*, (2025) yang menganalisis pengaruh bantuan

sosial, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia. Dan penelitian yang dilakukan Malentang *et al.*, (2022) yang menganalisis pengaruh pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan dikota manado.

Walaupun sejumlah penelitian sebelumnya telah menganalisis hubungan antara inflasi, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, masih ditemukan ketidaksesuaian temuan empiris serta keterbatasan pendekatan metodologis yang mendasar. Mayoritas studi tersebut menghasilkan temuan yang bervariasi di mana sebagian variabel menunjukkan pengaruh negatif signifikan sementara yang lain tidak, penggunaan metode regresi statis yang tidak dinamis, serta minimnya integrasi keempat variabel secara serentak. Lebih lanjut belum terdapat kajian deret waktu (2005-2024) melalui model regresi linear berganda dengan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, termasuk untuk menggambarkan transisi pra/pasca pandemi Covid-19 serta bonus demografi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang bervariasi, serta fenomena yang terjadi. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mencari tahu bagaimana pengaruh dari inflasi, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan sehingga melatar belakangi penulis untuk mengambil judul **“Pengaruh Inflasi, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara”** dengan memiliki kebaruan yang terletak pada penggunaan data deret waktu periode 2005-2024 yang mencakup fase sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, dan penggunaan model regresi linear

berganda. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan variabel inflasi, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara simultan dalam menjelaskan tingkat kemiskinan, sehingga memberikan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada sebagian variabel. Kebaruan lainnya terletak pada pengkajian fenomena ketidaksesuaian antara potensi ekonomi Sumatera Utara yang besar dengan tingkat kemiskinan yang masih berfluktuasi, sehingga diharapkan mampu menghasilkan bukti empiris dan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penjelasan penelitian diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah Inflasi, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh secara bersamaan (simultan) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan adanya rumusan masalah penelitian diatas, adapun tujuannya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan, wawasan, serta informasi yang lebih mendalam mengenai pengaruh Inflasi, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman akademik serta menjadi referensi bagi pembaca yang ingin mendalami topik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan secara efektif melalui pengendalian inflasi, peningkatan kualitas pendidikan, dan perluasan kesempatan kerja.
2. Bagi Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi, khususnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan risiko peningkatan kemiskinan dapat diminimalkan.
3. Bagi Dinas Pendidikan, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui pemerataan sarana pendidikan, pemberian beasiswa, serta program yang meningkatkan partisipasi sekolah, sehingga kualitas sumber daya manusia semakin baik dan mampu menekan tingkat kemiskinan
4. Bagi Dinas Ketenagakerjaan, diharapkan dapat menjadi masuk dalam menyusun kebijakan yang mendorong peningkatan angkatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kualitas tenaga kerja agar masyarakat memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik.
5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian yang serupa.